

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2006-2008**



TUGAS AKHIR

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Akuntansi**

Oleh :

SAIFUL HUDA

NIM F3307004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul: "ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008", telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program D III Akuntansi FE UNS.

Surakarta, Juli 2010

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak

NIP: 19660919 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.

Surakarta, Juli 2010

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Adi Firman Ramadhan, SE., Ak

(.....)

Dosen Penguji

2. Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak

(.....)

Dosen Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Hadapi semua dengan senyuman.*
- *Berjuanglah untuk hidupmu, agamamu, keluargamu, sahabat-sahabatmu dan semua orang disekitarmu.*
- *Pengalaman adalah guru yang terbaik.*
- *Bermain musik adalah cara terbaik untuk melepaskan semua emosi jiwamu.*
- *Berjuanglah sampai titik darah penghabisan.*
- *Percayalah pada kemampuan yang kau punya yang telah diberikan oleh Allah SWT.*
- *Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (QS. Ali Imron : 200).*

Penulis persembahkan kepada :

1. *Allah SWT* yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.
2. *Ibunda dan Ayahanda* yang telah memberikan yang terbaik dalam hidupku.
3. *Sahabat-sahabat* yang selalu mewarnai hidupku.
4. *Almamater.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008”. Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar tentunya karena bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan selalu menunjukkan jalan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Sri Murni, SE., Ak selaku ketua program studi Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Yacob Suparno, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing Akademik dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.

5. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir dari awal hingga akhir penulisan.
6. Para dosen pengajar di Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan banyak ilmu selama berada di bangku kuliah.
7. Almamaterku yang telah memberiku kesempatan untuk mengapai semua impianku.
8. Seluruh staff dan karyawan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang telah membimbing penulis selama kegiatan magang dan penelitian.
9. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan yang terbaik untuk hidup penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Kakak dan adekku yang selalu memberikan inspirasi dan ide-ide cemerlang.
11. Lisnayanti temen seperjuangan dari SMP sampai kuliah yang selalu memberikan dorongan, motivasi tanpa mengenal lelah dalam penulisan tugas akhir ini.
12. Mualim (*Mamin*) yang slalu memberikan semangat dan waktu refresink “*maen PS*” ketika penat melekat dibenakku saat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Bangun (*badruk*) yang membantuku mencari hardisk baru dan memperbaiki hardiskQ yang rusak ditengah aku bergelut dengan tugas akhir ini.
14. Topan (*Tsauban*), Joko (*Silir*), Jandu kalian adalah sahabat terbaik dalam hidupku.
15. *Someone* yang kuliah di Semarang dan *someone* di kampus FE yang telah mengajariku tentang arti sebuah cinta sejati.

16. Hardiyo, Anggit B.W. (*Bebek*), Agung, Adrian, Aditya (*Baron*), Sunu, adalah sahabat-sahabat terbaik di kampus FE yang takkan pernah kulupakan dalam hidupku.
17. Brilian (*Mbendul*), Arga (*Cebret*), Yudistira (*Monyet*), Didit (*Somad*) dan semua sahabat-sahabatku di rumah kontrakan “*Green House*” yang telah memberiku pelajaran arti sebuah persahabatan dan kehidupan.
18. Kawan-kawan IS 3 dan X 4 SMANSA Sukoharjo, kalian semua adalah inspirasi hidupku.

Akhirnya penulis sadar sepenuhnya akan kekurangan yang dimiliki penulis, dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan selanjutnya. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

Wassallammu'alaikum Wr. Wb

Surakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH	
KABUPATEN SUKOHARJO	1
1. Kabupaten Sukoharjo	1
2. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo	2
3. Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	3

B. GAMBARAN UMUM DPPKAD KABUPATEN	
SUKOHARJO.....	5
1. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo	5
2. Tugas Dan Fungsi Pokok DPPKAD Kabupaten	
Sukoharjo	5
3. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo	7
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan DPPKAD	
Kabupaten Sukoharjo	7
C. LATAR BELAKANG MASALAH	15
D. PERUMUSAN MASALAH	17
E. TUJUAN PENELITIAN	17
F. MANFAAT PENELITIAN	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN	
A. LANDASAN TEORI	19
1. Pengertian Kinerja	19
2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	22
3. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan	23
4. Pengertian Laporan Kinerja Keuangan	26

B. PEMBAHASAN	31
1. Pendapatan Daerah	31
2. Belanja Daerah	33
3. Pembiayaan	34
4. Komparatif	35
5. Rasio Likuiditas	38
6. Rasio Solvabilitas	39
7. Rasio Lverage	40
8. Rasio Kemandirian	41
9. Pencapaian Kinerja Kabupaten Sukoharjo	42
 BAB III TEMUAN	
A. KELEBIHAN	46
B. KELEMAHAN	47
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

ABSTRACT

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008

SAIFUL HUDA
F3307004

The purpose of this study is to determine the level of development of local government performance in Sukoharjo district in fiscal year 2006-2008. In addition, to determine who carried out the policies of the Local Government Sukoharjo district in order to optimize its performance in delivering public services. And demonstrating accountability Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo district as Financial Manager Sukoharjo district.

Step of this research was done by comparing the theory with the analysis of financial performance Sukoharjo District Government budget year 2006 - 2008 conducted by the researchers. Based on the Financial Statements Sukoharjo especially the performance report prepared by DPPKAD Sukoharjo district. In order to examine how far the level of performance during the Sukoharjo district.

The results of this study is DPPKAD Sukoharjo district has implemented policies in accordance with applicable regulations and has reached 100% of the agreed budget. This is evident from the policies that have been taken in the revenues, expenditures and financing of the region during 2006 -2008. Because it has a positive impact negatively on the level of orderliness and financial administration, facilities and personnel infrastructure that continues to increase, the level of Resource Officers, and the level of public services in Sukoharjo district.

The conclusion of this research is DPPKAD Sukoharjo district has implemented policies well in the revenue, expenditure, and financing areas, although there are still some policies that have not been realized properly. So DPPKAD Sukoharjo district should be able to improve its performance in the future. In order to achieve transparency and accountability in financial management as Sukoharjo district.

Based on the results of the study, researchers gave some suggestions on DPPKAD Sukoharjo district to explore other sources of income that could increase local income and manage existing sources of revenue. In addition DPPKAD Sukoharjo district must conduct a review of local shopping. Apparatus Resources Improvements should also be done in order to be able to provide the best service to the community Sukoharjo

Keywords: analysis, performance, policies

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008

SAIFUL HUDA
F3307004

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 – 2008. Disamping itu, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Serta menunjukkan akuntabilitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Keuangan Kabupaten Sukoharjo.

Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2006 – 2008 yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan Laporan Keuangan Kabupaten Sukoharjo khususnya laporan kinerja yang disusun oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Hasil dari penelitian ini adalah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta telah mencapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah selama 2006 – 2008. Karena telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap tingkat ketertiban administrasi keuangan, sarana dan prasarana aparatur yang terus meningkat, tingkat Sumber Daya Aparatur, serta tingkat pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan baik dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, meskipun masih ada beberapa kebijakan yang belum terealisasi dengan baik. Sehingga DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus mampu memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang. Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selaku pengelola keuangan daerah kabupaten sukoharjo.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk menggali sumber pendapatan yang lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola sumber pendapatan yang ada. Disamping itu DPPKAD kabupaten Sukoharjo harus melakukan review terhadap belanja daerah. Peningkatkan sumber daya aparatur juga harus dilakukan supaya mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Kata kunci: kinerja, analisis, kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

1. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 daerah Kabupaten atau Kotamadya di Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan adalah 444,666 km², terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan, berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di sebelah barat dan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur. Terdapat Sungai Bengawan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi dua bagian, yaitu: bagian utara dengan kondisi secara umum berupa dataran rendah dan bergelombang, sedangkan bagian selatan berupa pegunungan dan dataran tinggi.

Sektor industri menjadi andalan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat dua industri besar di Kabupaten Sukoharjo, yaitu PT. Sritex yang merupakan perusahaan tekstil nasional yang sudah terkenal di luar negeri, yang menjadi salah satu kebanggaan Sukoharjo. Ada lagi industri besar lainnya, yaitu PT Konimex Pharmaceutical Laboratories, pabrik farmasi terutama untuk jenis produk obat bebas yang produknya sudah menembus pasaran luar seperti Kamboja, Vietnam dan Birma. Terdapat juga industri kecil daerah ini, berbagai produk kerajinan rakyat terus dikembangkan misalnya kaca grapir yang

merupakan industri kerajinan khas daerah Sukoharjo yang berkembang di Kecamatan Kartasura, Grogol dan Baki. Ada juga industri rotan yang berkembang di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak.

Sektor perdagangan menjadi pilihan menarik masyarakat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi setelah produksi pertanian terus menurun akibat hasil panen yang kurang baik. Sesungguhnya Sukoharjo unggul di lapangan usaha pertanian, namun Sukoharjo yang terus berkembang ke arah industrialisasi memang tidak bisa di cegah. Akibatnya, banyak lahan persawahan penduduk yang harus berubah untuk kepentingan industri dan perumahan.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Sukoharjo

a) Visi Kabupaten Sukoharjo

Mewujudkan Sukoharjo yang makmur, sejahtera dan mandiri serta bertakwa

b) Misi Kabupaten Sukoharjo

- 1) Mengamalkan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada Peningkatan Ketahanan Pangan dan UKM.
- 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perekonomian.
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bebas KKN.
- 5) Mewujudkan supremasi Hukum, penegakan Hukum di daerah.
- 6) Menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tentram.

3. Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan secara terpolo dan terpadu dengan mengelompokkan sub wilayah pembangunan yang terdiri dari:

a) Sub Wilayah Pembangunan I

Meliputi wilayah Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kartasura. Potensi pengembangan: pertanian tanaman pangan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan dan pariwisata.

b) Sub Wilayah Pembangunan II

Meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki dengan pusat pengembangan di Kecamatan Grogol. Potensi pengembangan: Pertanian, tanaman pangan, industri, perdagangan, pemukiman/perumahan dan pariwisata.

c) Sub Wilayah Pembangunan III

Meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan dan timur dengan pusat pengembangan di Kecamatan Mojolaban. Potensi Pengembangan: pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan dan pariwisata.

d) Sub Wilayah Pembangunan IV

Meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari bagian barat dengan pusat pengembangan di Kota Sukoharjo. Potensi Pengembangan: Pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan,

Pemerintahan, Pemukiman/Perumahan dan Pariwisata, industri, pariwisata dan Pendidikan.

e) Sub Wilayah Pembangunan V

Meliputi wilayah Kecamatan Nguter dengan pusat pengembangan di Kota Nguter. Potensi Pengembangan: Industri, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perdagangan.

f) Sub Wilayah Pembangunan VI

Meliputi wilayah Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru dengan pusat pengembangan di kota Tawang Sari. Potensi pengembangan: adalah pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perhubungan, pertambangan/bahan galian, industri kecil dan pariwisata.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN SUKOHARJO

1. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/ rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD.

2. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 11 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah r yai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- d. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai misi – misi yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah.
- b. Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran Daerah.
- c. Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi belanja Daerah.

- d. Meningkatkan fungsi pengendalian kas Daerah, perbendaharaan umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan Daerah.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian, program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Sekretariat.

- 1) Sub Bagian Program

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

- 2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang anggaran.

1) Seksi Perencanaan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.

2) Seksi Penyusunan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.

3) Seksi Pelaksanaan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.

d. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Pendapatan.

1) Seksi Pendapatan Asli Daerah

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendapatan asli daerah.

2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

e. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening kas umum daerah.

1) Seksi Perbendaharaan I

Mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan I.

2) Seksi Perbendaharaan II

Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan II.

3) Seksi Perbendaharaan III

Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan III.

f. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis data

keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Akuntansi.

1) Seksi Verifikasi

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi.

2) Seksi Akuntansi

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi.

3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan laporan keuangan.

g. Bidang Kas

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Kas.

1) Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan.

2) Seksi Pengeluaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.

3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan.

h. Bidang Aset dan Investasi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang Aset dan Investasi Daerah.

1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah.

2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah

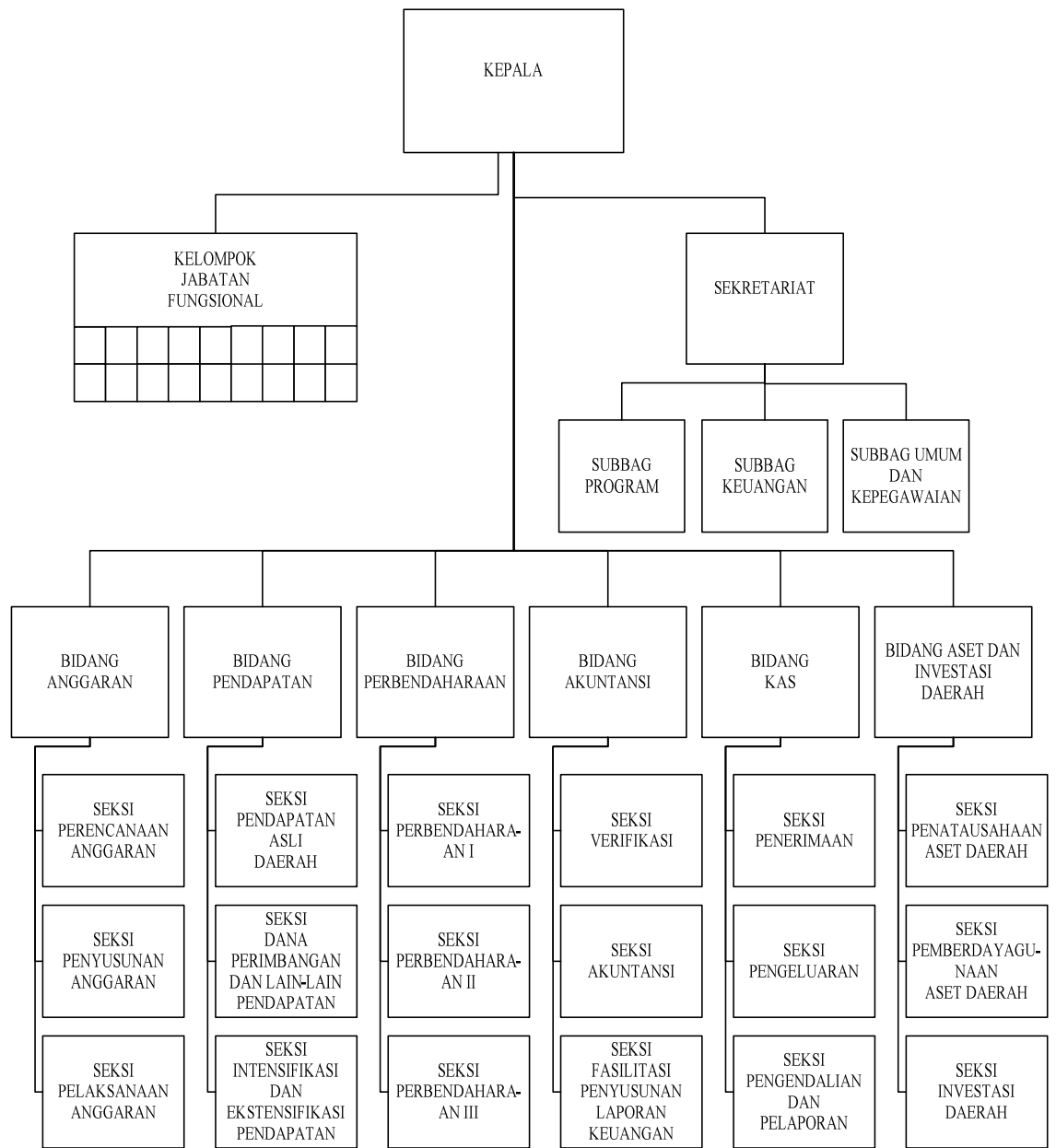
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah.

3) Seksi Investasi Daerah

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang investasi daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.



Gambar I.1.

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

C. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik (*public services*) dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan

pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pada rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk pelayanan oleh masing-masing daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:503) kinerja merupakan kata benda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (tt peralatan).

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007 : iv).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan peraturan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tal } Pasal 1 serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008. Pembentukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ini guna membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan otonomi daerah. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selaku organisasi

dinas daerah atau instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas DPPKAD Kabupaten Sukoharjo tersebut tidaklah mudah, karena penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD sepenuhnya menjadi tanggungjawab DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu, segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam suatu periode sangat dipengaruhi oleh kemampuan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tergantung pada program-program dan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selaku pengelola keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam menjalankan tugas tersebut, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo pasti menemukan banyak kendala-kendala, baik dalam penyusunan program-program dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dimungkinkan ada kebijakan yang belum terealisasi dengan baik, yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, layak untuk dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2006-2008”**.

D. PERUMUSAN MASALAH

Tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (Sektor Publik) untuk memberikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dituntut harus meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006-2008 ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis, antara lain sebagai berikut ini:

1. Mengetahui tingkat perkembangan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 – 2008.
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan kinerjanya.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Sukoharjo, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah wawasan tentang Akuntansi Sektor publik.

3. Bagi dunia akademik, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan literatur Akuntansi sektor publik (ASP) di Indonesia khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
4. Pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca tentang penerapan Akuntansi Sektor Publik yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

ANALISIS PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode (Indra Bastian, 2006 : 274).

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses (Larry D. Stout dalam Indra Bastian, 2006 : 275).

Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Indra Bastian, 2006 : 275).

Menurut Indra Bastian (2006 : 275) kinerja merupakan alat manajemen untuk hal-hal berikut:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang telah disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang disepakati.
- e. menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Menurut Indra Bastian (2006 : 318-321) beberapa tipe benchmark yang sering digunakan untuk menilai kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Kinerja pada periode sebelumnya.
- b. Kinerja unit organisasi atau area geografis serupa.
- c. Hasil untuk beban kerja atau kelompok pengguna layanan yang berbeda.
- d. Standar umum yang dikenal.
- e. Kinerja dari yurisdiksi lain atau *private*.
- f. Perbedaan pelaksanaan penyediaan pelayanan.
- g. Sasaran yang ditentukan pada awal periode kinerja.

Menurut Indra Bastian (2006 : 276-277) aspek-aspek kinerja yang diukur, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek finansial;
- b. Kepuasan pelanggan;
- c. Operasi dan bisnis internal;
- d. Kepuasan pegawai;
- e. Kepuasan komunitas dan *shareholders/stakeholders*; dan
- f. Waktu.

Menurut Indra Bastian (2006 : 321-322) batasan potensial perbandingan pengukuran kinerja, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Fakta mengindikasikan bahwa tidak ada yurisdiksi atau organisasi yang dapat dibandingkan secara keseluruhan.
- b. Bahwa perbandingan pengukuran kinerja seperti alat dapat disalahgunakan.

- c. Indikator proses penentuan perbandingan kinerja yang dilakukan dengan mengidentifikasi unit kerja organisasi yang dapat dibandingkan; mengumpulkan dan memeriksa informasi kinerja; menganalisa serta membandingkan informasi yang memerlukan waktu yang substantif, usaha, dan biaya.
- d. Data perbandingan pengukuran kinerja.
- e. Kinerja buruk unit kerja organisasi yang diidentifikasi dan dilaporkan, akan mendorong keengganan berbagai organisasi serupa untuk mengukur dan melaporkan kinerja.

2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan berarti melakukan penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Falikhatun dan Putri Nugrahaningsih, 2007 : 6).

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 69) beberapa karakteristik dari analisis laporan keuangan, antara lain:

- a. Fokus pada laporan keuangan utama.
- b. Memuat analisis hubungan.
- c. Memuat implikasi dan prediksi.
- d. Dipengaruhi oleh kemampuan analisis.

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 25) laporan keuangan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 20) keuangan daerah dikelola dengan berdasarkan azas umum: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 70) adalah sebagai berikut:

- a. Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya
- c. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya.
- d. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya.

- e. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya.
- f. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan analisis laporan keuangan menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 70-71), antara lain:

- a. Dapat menyediakan tamblasi atas data dan informasi yang memang sudah tersedia pada laporan keuangan.
- b. Dapat memberikan informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan.
- c. Dapat mengetahui terdapatnya kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan.
- d. Dapat mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya.
- e. Dapat menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang.
- f. Dapat mengevaluasi kondisi keuangan entitas masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang.

- g. Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan entitas, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas.

Menurut Indra Bastian (2006 : 313) analisis data dari sistem pengukuran kinerja yang baik dapat membantu organisasi untuk hal-hal berikut ini:

- a. Mengidentifikasi kondisi pelaksanaan program yang mendorong perbaikan program.
- b. Membantu pengembangan katan strategi pelayanan.
- c. Menyediakan petunjuk permasalahan dan apa yang dilakukan dalam meningkatkan hasil.
- d. Membantu penilaian tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Menurut Indra Bastian (2006 : 250) analisa laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam laporan yang ada, yaitu:

- a. Laporan kinerja keuangan (Neraca);
- b. Likuiditas pemerintahan;
- c. Komposisi Investasi;
- d. Kekayaan pemerintah;
- e. Komposisi kewajiban;
- f. Revaluasi cadangan;
- g. Komposisi hutang pensiun;
- h. Laporan kinerja keuangan (surplus-defisit);
- i. Efektivitas penarikan;

- j. Tingkat pelanggaran peraturan keuangan;
- k. Komposisi pendapatan;
- l. Komposisi pengeluaran;
- m. Beban bunga pinjaman;
- n. Rugi surplus translasi mata uang;
- o. Laporan arus kas;
- p. Komposisi arus kas;
- q. Tingkat penarikan pajak l _ _ _ _ al, organisasi maupun produk;
- r. Komposisi pajak tidak lar _ _ _ _
- s. Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain;
- t. Komposisi pengeluaran kas;
- u. Komposisi pengeluaran investasi;
- v. Komposisi pencairan investasi;
- w. Komposisi likuiditas pertukaran mata uang;

4. Pengertian Laporan Kinerja Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antar pos untuk mengetahui kondisi keuangan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007 : 71).

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit, atau laporan

profit dan loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu tahun periode (Indra Bastian, 2006 : 248).

Indra Bastian (2006 : 303) pelaporan kinerja merupakan “refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan”.

Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi (Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007 : 28).

Menurut Indra bastian (2006 : 303-306) karakteristik pelaporan kinerja organisasi sektor publik yang berkualitas meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Fokus pada hal-hal penting
- b. Menghubungkan tujuan dengan hasil.
- c. Menyajikan hasil sesuai dengan konteksnya.
- d. Mengaitkan sumber daya dengan hasil.
- e. Menyajikan informasi yang bersifat komparatif.
- f. Mempertimbangkan faktor keandalan/realibilitas.

Indra Bastian (2006 : 248) juga mengemukakan bahwa laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut ini:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi.

- b. Surplus atau defisit dari aktivitas operasi.
- c. Biaya keuangan (biaya pinjaman).
- d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ef
- e. Surplus atau defisit dari ϵ λ .
- f. Pos-pos luar biasa.
- g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto.
- h. Surplus atau defisit neto untuk suatu periode.

Ada beberapa prosedur analisa data laporan kinerja untuk pengujian secara sistematis (Indra bastian, 2006 : 313-316), antara lain sebagai berikut:

- a. Pengujian perubahan sepanjang waktu.
- b. Pengujian *breakout* hasil bagi setiap indikator hasil perlu dilakukan untuk menilai di mana kinerja dilakukan secara baik dan adil, atau buruk.
- c. Membandingkan hasil program dengan hasil-hasil program serupa di organisasi berbeda.
- d. Menggunakan prinsip pengecualian, yaitu toleransi melalui penjelasan hasil indikator kinerja diluar jangkauan target.
- e. Mendapatkan dan menguji penjelasan informasi.
- f. Menentukan apakah data pada banyak tipe indikator kinerja adalah konsisten.
- g. Fokus pada setiap individu yang berada di rentang indikator hasil.
- h. Menguji hasil ganda bersama untuk mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh atas kinerja seluruhan.

- i. Penggunaan data kinerja yang lalu untuk tindakan yang cepat bagi prosedur baru untuk membantu mengevaluasi hasil.

Menurut Mohammad Mahsun (2006 : 31) pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

- a. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berujud (*tangible*) maupun tidak berujud (*intangibile*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Menurut Indra Bastian (2006 : 306-308) fungsi pelaporan kinerja adalah:

- a. Sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja.
- b. Sebagai alat akuntabilitas.
- c. Sebagai alat untuk menentukan kinerja terbaik.

Smith (1990) dalam Indra Bastian (2006 : 269-270) memberikan lima (5) alasan mengapa variasi pengukuran kinerja bisa diamati di dalam organisasi:

- a. Organisasi bisa mengikuti tujuan yang berbeda.
- b. Organisasi bisa mempunyai lingkungan yang berbeda.
- c. Organisasi bisa menghadapi sumber-sumber biaya yang berbeda.
- d. Organisasi bisa melaporkan kinerjanya yang berbeda.
- e. Organisasi bisa mempunyai level efisiensi yang berbeda.

Menurut Indra Bastian (2006 : 277) ada yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja agar dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan emulainya dengan segera.
- b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*on going proses*).
- c. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 74-75) keterbatasan analisis laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Sifat laporan keuangan adalah historis.
- b. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum.
- c. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan.
- d. Hakikat laporan keuangan a formasi kuantitatif.
- e. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan.

Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007 : 75-76) adalah sebagai berikut:

- a. Analisis hubungan pos-pos laporan keuangan.
- b. Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan.
- c. Analisis kecenderungan pos-pos laporan keuangan

B. PEMBAHASAN

1. Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan efektivitas dan efisiensi PAD. Hal ini, dapat dilihat dengan ditetapkan anggaran pendapatan selama tahun anggaran 2006 – 2008 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010. Untuk hal tersebut, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selaku pengelola keuangan daerah melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk pendapatan daerah sebagai berikut ini:

- a. PAD lebih dari 10% dari tahun anggaran sebelumnya.
- b. Kebijakan keuangan kelompok dana perimbangan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Pusat dan atau propinsi.
- c. Kebijakan keuangan pendapatan daerah dari pos lain-lain menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi.

Pencapaian kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.1

Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2006 – 2008

Tahun	APBD setelah Perubahan		Realisasi APBD		lebih/kurang
2005	Rp	27,634,570,375.00	Rp	30,384,474,927.00	10%
2006	Rp	35,724,137,450.00	Rp	44,008,080,723.00	23%
2007	Rp	38,621,230,250.00	Rp	42,449,908,063.00	10%
2008	Rp	41,661,997,750.00	Rp	41,785,061,436.69	0%
Target 10 % dari Anggaran setelah Perubahan Tahun sebelumnya					
2006					59%
2007					19%
2008					8%

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terlihat jelas dalam tabel tersebut bahwa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan masih belum optimal karena tahun 2006 sebesar 56%, lalu pada tahun 2007 sebesar 19%, dan yang terakhir pada tahun 2008 sebesar 8% dari anggaran setelah perubahan tahun sebelumnya. Selama 3 tahun tersebut tugas DPPKAD Kabupaten Sukoharjo pada pendapatan daerah hanya pada tahun 2008 yang mengalami kegagalan, karena pendapatan daerah tidak dapat melampaui target/kebijakan yang diambilnya. Untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pada Bidang Akuntansi sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi.

2. Belanja Daerah

Ada beberapa kebijakan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Belanja administrasi umum non gaji, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai/personalia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pencapaian kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.2

Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2006 –
2008

Tahun	APBD setelah Perubahan	Realisasi APBD	Pencapaian
2006	Rp 554,870,709,800.00	Rp 486,775,928,653.00	88%
2007	Rp 705,335,440,735.00	Rp 634,307,972,862.00	90%
2008	Rp 751,294,593,850.00	Rp 717,122,973,682.00	95%

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2008 cukup baik. Karena sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

yaitu tidak melebihi 100% dari anggaran setelah perubahan tahun yang bersangkutan. Namun, grafik pertumbuhannya yang terus menurun perlu diperhatikan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, karena hal tersebut menunjukkan program efektivitas dan efisiensi belanja perlu ditinjau kembali guna menekan pertumbuhan belanja daerah.

3. Pembiayaan

Ada beberapa kebijakan dalam pembiayaan Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan mengalokasikan surplus anggaran pada sisa lebih tahun berkenaan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal, dan dana cadangan.
- b. Perkiraan sisa lebih tahun anggaran yang lalu akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan sebagian dialokasikan pada sisa lebih tahun anggaran berkenaan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal, dan dana cadangan.
- c. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan pinjaman jika benar-benar dibutuhkan dan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan pinjaman harus dalam bentuk pinjaman jangka pendek demi menjaga likuiditas kas daerah.

Pencapaian kinerja pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.3
Analisis Hubungan
Laporan Kinerja Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2006 – 2008

Nama Akun	Realisasi Anggaran		
	2006	2007	2008
Pendapatan (a)	Rp 549,271,165,763.00	Rp 615,262,195,353.00	Rp 687,615,773,931.69
Belanja (b)	Rp 486,775,928,653.00	Rp 634,607,972,862.00	Rp 717,122,973,682.00
Surplus / (Defisit) (c = a - b)	Rp 62,495,237,110.00	Rp (19,345,777,509.00)	Rp (29,507,199,750.31)
Pembiayaan :			
Penerimaan (d)	Rp 66,575,268,915.31	Rp 179,116,853,493.31	Rp 93,185,050,205.31
Pengeluaran (e)	Rp 129,070,506,025.31	Rp 69,687,096,863.00	Rp 10,097,190,728.00
Surplus / (Defisit) (f = d - e)	Rp (62,495,237,110.00)	Rp 109,429,756,630.31	Rp 83,087,859,477.31
SILPA (g = c - f)	Rp -	Rp 90,083,979,121.31	Rp 53,580,659,727.00

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Karena dari analisis hubungan antar pos-pos laporan kinerja tersebut terlihat jelas bahwa tidak ada penyimpangan dalam penyajiannya. Untuk masalah SILPA, menurut Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo akan ditutup pada anggaran surplus tahun 2012 yang akan datang.

4. Komparatif

Dalam neraca keuangan, tersirat aktivitas-aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dari segi keuangan. Dari neraca juga dapat dilihat kinerja Kabupaten Sukoharjo. Untuk hal tersebut, analisis komparatif dilakukan penulis untuk memperkuat hasil analisis sebelumnya diatas. Perkembangan Neraca Kabupaten Sukoharjo antara lain, sebagai berikut ini:

Tabel II.4

Analisis komparatif

Neraca Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2006 – 2008

Nama Akun	2006	2007	2008	2006 dg 2007	2006 dg 2008	2007 dg 2008
ASET						
Aset Lancar	Rp 131,112,062,084.00	Rp 97,699,741,340.25	Rp 65,821,411,577.09	-25%	-50%	-33%
Investasi Jangka Panjang	Rp 37,912,483,358.00	Rp 50,672,489,358.00	Rp 56,622,489,358.00	34%	49%	12%
Aset Tetap	Rp 632,903,330,081.00	Rp 722,547,456,774.20	Rp 849,355,717,665.00	14%	34%	18%
Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
Aset Lainnya	Rp -	Rp 180,000,000.00	Rp 963,037,500.00	-	-	435%
Total Aset	Rp 801,927,875,523.00	Rp 871,099,687,472.45	Rp 972,762,656,100.09	9%	21%	12%
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 357,168,963.21	Rp 307,710,038.63	Rp 226,064,712.60	-14%	-37%	-27%
Kewajiban Jangka Panjang	Rp 1,209,005,406.77	Rp 1,025,224,359.07	Rp 852,711,529.27	-15%	-29%	-17%
Total Kewajiban	Rp 1,566,174,369.98	Rp 1,332,934,397.70	Rp 1,078,776,241.87	-15%	-31%	-19%
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	Rp 130,754,893,121.27	Rp 97,392,031,301.62	Rp 65,595,346,864.49	-26%	-50%	-33%
Ekuitas Dana Investasi	Rp 669,606,814,032.23	Rp 772,374,721,773.13	Rp 906,088,532,993.73	15%	35%	17%
Ekuitas Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
Total Ekuitas Dana	Rp 800,361,707,153.50	Rp 869,766,753,074.75	Rp 971,683,879,858.22	9%	21%	12%
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp 801,927,881,523.48	Rp 871,099,687,472.45	Rp 972,762,656,100.09	9%	21%	12%

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pos-pos pada Neraca Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 – 2008 yang mengalami kenaikan sangat tajam pada pos aset lainnya yang tiap tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan pos yang lain dalam aset seperti aktiva lancar mengalami penurunan 25 % dan 50% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 33% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007. Investasi jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 34% dan 49% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 12% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007 dan aset tetap yang terus meningkat sebesar 14% dan 34% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun

anggaran 2006 serta 18% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007.

Disamping itu, pada pos kewajiban juga terjadi penurunan secara keseluruhan sebesar 15% dan 31% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 19% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007. Hal tersebut dapat diperinci lagi seperti pada kewajiban jangka pendek sebesar 14% dan 37% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 27% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007, kewajiban jangka panjang sebesar 15% dan 29% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 17% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007. Sedangkan pada pos ekuitas dana secara keseluruhan mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, yaitu sebesar 9% dan 21% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 12% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007, meskipun pada pos ekuitas dana lancar turun sebesar 26% dan 50% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 33% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007 dan mempengaruhi kenaikan ekuitas dana investasi sebesar 15% dan 35% dari tahun anggaran 2007 dan 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2006 serta 17% pada tahun anggaran 2008 dengan pembandingan tahun anggaran 2007.

5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas ini merupakan teknik untuk menganalisis kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar utang/kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas (terhadap utang jangka pendek). Pos persediaan pada neraca Pemerintah Daerah umumnya bukan persediaan barang dagang yang ditujukan untuk dijual tetapi untuk digunakan dalam operasi pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan rasio kas untuk menunjukkan perbandingan yang lebih likuid dari rasio lancar, karena tidak seluruh aktiva lancar yang digunakan untuk perhitungan ini melainkan hanya kas dan setara kas saja yang dibagi dengan hutang lancar. Rumus untuk menghitung rasio lancar dan rasio kas, yaitu sebagai berikut ini:

$$\text{Rasio lancar} = (\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{utang jk.}$$

$$\text{Rasio kas} = \text{kas dan setara kas} : \text{utang jk. Pendek}$$

Dengan rumus diatas dapat dhitng rasio likuiditas sebagai berikut ini:

Tabel II.5

Rasio Likuiditas

Tahun Anggaran 2006 – 2008

Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Kas dan Setara kas	Rp 122,197,716,060.00	Rp 89,254,893,872.00	Rp 53,919,525,454.00
Aktiva Lancar	Rp 131,112,062,084.00	Rp 97,699,741,340.25	Rp 65,821,411,577.09
Persediaan	Rp 7,064,473,649.00	Rp 6,572,374,159.25	Rp 10,376,721,036.09
Utang Jangka Pendek	Rp 357,168,963.21	Rp 307,710,038.63	Rp 226,064,712.60
Rasio Lancar	Rp 347.31	Rp 296.15	Rp 245.26
Rasio Kas	Rp 342.13	Rp 290.06	Rp 238.51

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan perhitungan rasio kas menunjukkan bahwa setiap utang lancar yang dimilikinya pada tahun anggaran 2006 dijamin dengan Rp 347,31 aktiva lancar, kemudian pada tahun anggaran 2007 dijamin dengan Rp 296,15 aktiva lancar, dan pada tahun anggaran 2008 dijamin dengan Rp 245,26 aktiva lancar, serta pada saat menggunakan rasio kas untuk mengetahui lebih detail, menunjukkan bahwa setiap utang lancar pada tahun anggaran 2006 dijamin dengan Rp 342,13 aktiva lancar, kemudian pada tahun anggaran 2007 dijamin dengan Rp 290,06, dan pada tahun anggaran 2008 dijamin dengan Rp 238,51 aktiva lancar.

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi sangat likuid karena aktiva lancarnya dapat menjamin setiap utang lancar. Namun, perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2008 terus menurun karena DPPKAD Kabupaten Sukoharjo belum optimal melaksanakan tugasnya selaku instansi yang mengelola keuangan Kabupaten Sukoharjo.

6. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas ini, untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Dengan rasio ini, dapat diketahui secara detail kemampuan Kabupaten Sukoharjo dalam membayar utang jangka panjang selama tahun anggaran 2006 – 2008. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut ini:

$$\text{Rasio solvabilitas} = \text{total aktiva} : \text{total utang}$$

Dengan rumus di atas dapat dihitung rasio solvabilitas dalam tabel berikut ini:

II.6

Rasio Solvabilitas

Tahun Anggaran 2006-2008

Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Total Aktiva	Rp 801,927,881,523.00	Rp 871,099,687,472.45	Rp 972,762,656,100.09
Total Utang	Rp 1,566,174,369.98	Rp 1,332,934,397.70	Rp 1,078,776,241.87
Rasio Solvabilitas	Rp 512.03	Rp 653.52	Rp 901.73

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo masih sangat solvable karena dari tahun 2006 perbandingan total utang dengan total aktiva mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun anggaran 2006, setiap Rp 1 utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dijamin dengan Rp 512,03 asetnya, kemudian naik menjadi Rp 653,52 pada tahun anggaran 2007, dan Rp 901,73 pada tahun anggaran 2008.

7. Rasio Lverage

Rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih Pemda) dengan total utang. Dengan rasio ini, dapat diketahui seberapa besar kemampuan Kabupaten Sukoharjo dalam membayar hutang jika ditinjau dari ekuitas dana yang dimilikinya. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut ini:

$$\text{Rasio leverage} = \text{total ekuitas dana} : \text{total}$$

Dengan rumus di atas dapat dihitung rasio leverage dalam tabel berikut ini:

Tabel II.7

Rasio Lverage

Tahun Anggaran 2006-2008

Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Total Ekuitas Dana	Rp 800,361,707,153.50	Rp 869,766,753,074.75	Rp 971,683,879,858.22
Total Utang	Rp 1,566,174,369.98	Rp 1,332,934,397.70	Rp 1,078,776,241.87
Rasio Lverage	Rp 511.03	Rp 652.52	Rp 900.73

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan kekayaan bersih (ekuitas dana) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan utang, besarnya 511,03 : 1 pada tahun anggaran 2006, kemudian naik menjadi 652,52 : 1 pada tahun anggaran 2007, dan 900,73 : 1 pada tahun 2008. Hal ini berarti kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sangat solid, karena pada tahun anggaran 2006 – 2008 menunjukkan peningkatan. Hal

ini, membuktikan bahwa DPPKAD Kabupaten Sukoharjo cukup baik dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

8. Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dalam hal pendanaan semua aktivitasnya. Dari rasio ini, dapat diketahui kemandirian Kabupaten Sukoharjo Selama 2006 – 2008. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut ini:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD} + \text{DAU} - \text{Utang PFK} - \text{Utang pajak pusat}}{\text{Utang PFK} + \text{Utang pajak pusat}}$$

Dengan rumus di atas dapat dihitung rasio kemandirian dalam tabel berikut ini:

1.8

Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran 2006-2008

Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Realisasi PAD	Rp 44,008,089,723.00	Rp 42,449,908,063.00	Rp 41,785,061,436.69
DAU	Rp 421,438,000,000.00	Rp 460,662,000,000.00	Rp 498,935,688,000.00
Utang	Rp 1,566,174,369.98	Rp 1,332,934,397.70	Rp 10,376,721,036.09
Utang PFK	Rp 118,832,010.00	Rp 69,843,666.69	Rp 2,920,579.00
Utang pajak pusat	Rp -	Rp -	Rp -
Rasio Kemandirian	10%	9%	8%

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas dapat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 sebesar 10%, kemudian turun menjadi 9% pada tahun 2007, dan 8% pada

tahun anggaran 2008. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak begitu baik karena pada tahun anggaran 2006 – 2008 semakin menurun.

9. Pencapaian Kinerja Kabupaten Sukoharjo

Selama tahun anggaran 2006 – 2008 Kabupaten Sukoharjo memprioritaskan pembangunan sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006 – 2010. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang berkaitan dengan kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo yang dikelola dan dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut ini:

a. Tujuan yang ditetapkan

Selama tahun anggaran 2005 – 2008 telah ditetapkan tujuan, antara lain sebagai berikut ini:

- 1) Terwujudnya pelayanan yang lebih baik dalam mengelola Kekayaan Daerah kepada masyarakat melalui upaya pengembangan dan optimalisasi potensi pasar dan kekayaan yang ada.
- 2) Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi berupa pendapatan yang lebih besar kepada PAD.

b. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas pada tahun 2006 – 2008 telah ditetapkan sasaran, antara lain:

- 1) Terwujudnya peningkatan PAD terutama peningkatan pendapatan retribusi.
- 2) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel khususnya pengelolaan kekayaan daerah.
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana.
- 4) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Program dan kegiatan yang ditetapkan

Dengan adanya tujuan dan sasaran diatas telah ditetapkan program dan kegiatan, antara lain:

- 1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 2) Program peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan.
- 3) Program tertib administrasi keuangan.
- 4) Program peningkatan sumber daya aparatur, dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

d. Keluaran (*output*) atau hasil (*outcomes*)

Keluaran (*output*) atau hasil (*outcomes*) yang dicapai cukup baik, meskipun masih ada beberapa yang belum optimal. Hal itu, terlihat jelas dalam realisasi anggaran bahwa pendapatan telah mencapai lebih dari 100% yang telah ditetapkan dalam APBD Setelah Perubahan tahun yang bersangkutan, belanja daerah telah mencapai dibawah 100% yang telah ditetapkan dalam APBD Setelah Perubahan tahun yang bersangkutan,

dan pembiayaan yang sesuai dengan kebijakannya dari anggaran yang telah ditetapkan, serta beberapa analisis yang penulis lakukan guna mengetahui kondisi keuangan Kabupaten Sukoharjo yang sebenarnya terjadi selama tahun anggaran 2006 – 2008.

e. Kelompok manfaat (*benefit*)

Manfaat yang diperoleh dari kinerja Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2006 – 2008, antara lain:

1. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur guna memperlancar kegiatan otonomi daerah. Terlihat jelas dari penambahan aset Neraca Kabupaten Sukoharjo dan realisasi belanja pada tahun 2006 – 2008.
2. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil menertibkan administrasi keuangan karena terlihat jelas dengan adanya penyuluhan rutin tiap bulan terhadap 38 satuan kerja di Kabupaten Sukoharjo.

f. Kelompok dampak (*impact*)

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi mengakibatkan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mengalami kegagalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya PAD.
2. Rendahnya Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Sukoharjo terutama pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan ada beberapa aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang masih dinilai tidak wajar oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada saat audit.

3. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana mengakibatkan peningkatan belanja dan pembiayaan daerah, sehingga efisiensi dan efektivitas terhadap belanja daerah dan pembiayaan belum optimal dilakukan.
4. Pelayanan yang kurang memuaskan masyarakat Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam membumihutuskan roda perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

REKONSTRUKSI

A. KELEBIHAN

Dari hasil analisis pada Bab II, terlihat ada beberapa temuan kelebihan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain sebagai berikut ini :

1. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tugasnya sebagai pengelola keuangan dengan baik, karena dalam penyusunan maupun pelaksanaannya kinerja telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapatan daerah telah mencapai lebih dari 100% yang telah ditetapkan dalam APBD Setelah Perubahan tahun yang bersangkutan, belanja daerah telah mencapai dibawah 100% yang telah ditetapkan dalam APBD Setelah Perubahan tahun yang bersangkutan, dan pembiayaan yang sesuai dengan kebijakannya dari anggaran yang telah ditetapkan.

2. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan ketertiban administrasi keuangan. Hal ini terlihat DPPKAD langsung melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada hari yang berkenaan dengan peristiwa tersebut.
3. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan baik. Terlihat dari realisasi belanja daerah dan aset tetap yang meningkat tiap tahunnya.
4. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil meningkatkan Sumber Daya Aparatur. Terlihat jelas upaya-upaya seperti penyuluhan terhadap 38 satuan kerja sering dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo guna mewujudkan akuntabilitasnya sebagai pengelola keuangan daerah.

B. KELEMAHAN

Dari hasil analisis pada Bab II, ada beberapa temuan kelemahan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain sebagai berikut ini :

1. Kegagalan DPPKAD kabupaten Sukoharjo melaksanakan program untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD. Hal ini terlihat dalam realisasi pendapatan daerah yang selama tahun anggaran 2006 – 2008 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan pada tahun 2008 sebesar 8% tidak dapat melampaui target PAD sebesar 10% yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
2. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selaku pengelola keuangan daerah masih belum optimal karena masih ada beberapa realisasi anggaran yang belum sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan tingkat kemandirian Kabupaten Sukoharjo yang sangat rendah.

3. Sumber Daya Aparatur DPPKAD Kabupaten Sukoharjo masih rendah dan harus ditingkatkan karena masih terdapat aset tetap yang disajikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang belum disajikan sebagaimana mestinya. Terlihat dalam hasil audit BPK bahwa masih meragukan penyajian atas aset tetap tersebut. Sehingga akuntabilitas para pegawai pemerintah terutama pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sukoharjo masih rendah.
4. Keberhasilan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur mengakibatkan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan Kabupaten Sukoharjo. sehingga efisiensi dan efektivitas terhadap belanja daerah dan pembiayaan belum optimal dilakukan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

UP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2006 – 2008 cukup baik. Hal ini terbukti bahwa DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selaku dinas yang mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo mampu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Karena target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat terealisasi dengan baik, meskipun ada beberapa target yang masih berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam APBD Setelah Perubahan selama tahun 2006 – 2008. Selama tahun 2006 – 2008 pendapatan daerah yang terus menurun tiap tahun, terutama pada tahun 2008 terjadi kegagalan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya meningkatkan pendapatan PAD. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana

aparatur telah terealisasi dengan baik, meskipun belanja daerah dan pembiayaan mengalami peningkatan guna mewujudkan hal tersebut. Disamping itu, DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dapat menertibkan administrasi keuangan dan meningkatkan sumber daya aparatur, meskipun belum optimal dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut ini :

1. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus mampu menggali sumber pendapatan yang lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola sumber pendapatan yang ada, supaya target pendapatan dapat terealisasi dengan baik.
2. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus melakukan *review* terhadap belanja daerah yang sekiranya tidak begitu efektif dan efisien dapat dikurangi/dihilangkan dan mengalokasikan dana anggaran belanja tersebut untuk belanja daerah yang sekiranya lebih penting untuk menekan laju pertumbuhan belanja daerah yang terus meningkat.
3. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan Sumber Daya Aparatur guna mewujudkan akuntabilitasnya sebagai pengelola keuangan Kabupaten Sukoharjo.
4. DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan semua aktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Jakarta: STAN
- Falikhatus dan Putri Nugrahaningsih. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta: UNS.
- Mahsun, Moh. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Departemen P dan K. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

www.sukoharjo.ac.id